

Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia dalam Lima Tahun Mendatang: Suatu Wawasan

A.R. SUTOPO*

Sejak pernyataan kemerdekaan, Indonesia telah terlibat dalam hubungan dengan negara-negara luar. Betapapun, urusan dengan negara-negara lain tetap menjadi suatu bagian yang penting bagi suatu negara, karena pertarungan dalam hubungan semacam ini adalah kelangsungan hidup negara itu sendiri. Tetapi kini dalam masyarakat terdapat kesan bahwa politik luar negeri seakan-akan tidak menduduki peranan yang begitu sentral seperti misalnya peranan politik di dalam negeri. Urusan hubungan luar negeri sering dianggap sebagai suatu hal yang rutin, yang hanya melibatkan pemerintah saja. Keadaan seperti ini tercerminkan misalnya oleh sedikitnya ulasan-ulasan yang secara khusus dilakukan untuk memahami hal itu oleh para birokrat dan cendekia di dalam negeri sendiri.

Pada saat seperti sekarang, ketika perdebatan mengenai politik pemerintah dalam berbagai hal sebagai pelaksanaan Repelita IV dibicarakan hampir setiap hari, perhatian masyarakat terhadap politik luar negeri boleh dikatakan minimum. Seolah-olah tidak terdapat masalah yang perlu dibicarakan lagi sejauh pelaksanaan politik luar negeri Indonesia untuk masa depan itu terlibat. Padahal dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1983-1988, politik luar negeri merupakan salah satu bagian yang digariskan.

Sejauh pelaksanaan hubungan luar negeri tersangkut, GBHN yang sekarang, seperti halnya dalam GBHN yang terdahulu, mencantumkan pedoman-pedoman bagi eksekutif setidak-tidaknya untuk jangka waktu lima tahun yang akan datang. Salah satu prinsip yang digariskan oleh GBHN dalam bidang hubungan luar negeri ini menyatakan bahwa "pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif dilaksanakan secara konsekuen dan diabdikan untuk ke-

*Staf CSIS.

pentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang." Selanjutnya, diamanatkan pula tentang peranan dan arena di mana Indonesia akan mewujudkan sasaran-sasaran dan cita-citanya yang berada di luar batas-batas yurisdiksi nasional, titik berat yang harus diperhatikan untuk maksud-maksud tersebut, dan bidang-bidang perjuangan antar bangsa yang menghendaki keterlibatan Indonesia, baik dalam lembaga-lembaga internasional dan regional maupun dalam forum-forum antar bangsa lainnya. Dengan perkataan lain, pedoman yang diamanatkan oleh GBHN pada dasarnya mencakup hampir semua jenis hubungan dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral.

Menghadapi medan yang demikian luas itu ternyata masyarakat luas tidak diberi cukup informasi mengenai segi-segi operasional dari politik hubungan luar negeri negaranya. Karena itu, GBHN-lah tampaknya landasan operasional yang paling dekat dengan masyarakat apabila ia hendak memahami hubungan luar negeri negaranya. Telaah ini pun akan mendasarkan sebagian terbesar landasannya pada GBHN. Akan tetapi telaah ini akan membatasi diri pada beberapa hal yang dianggap mewakili bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di masa depan. Tidak masuk dalam telaah ini adalah bagaimana formulasi di dalam negeri dilakukan dan siapa yang mengemban tugas-tugas yang telah dibebankan itu.

Sebelum telaah ini melangkah lebih lanjut, perlu terlebih dahulu secara ringkas membahas pengertian-pengertian yang hakiki dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pengertian-pengertian hakiki yang dimaksud adalah mengenai prinsip-prinsip politik luar negeri "bebas dan aktif" dan pengertian mengenai "kepentingan nasional." Pemahaman mengenai makna dari pengertian-pengertian tersebut tentu akan sangat menolong dalam urutan pilihan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia untuk jangka waktu tertentu di masa depan.

PRINSIP-PRINSIP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Pada dasarnya politik luar negeri Republik Indonesia merupakan pelaksanaan dari asas-asas dan tujuan-tujuan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya dari bagian alinea yang berbunyi: "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ..." Akan tetapi apa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 ini lebih merupakan landasan konstitusional dan abstraksi cita-cita daripada sebagai pedoman

operasional yang seharusnya diperankan oleh Indonesia dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Sedangkan apa yang dirumuskan dalam GBHN pada dasarnya merupakan usaha untuk memberi "bingkai" bagi politik luar negeri Indonesia dengan menyebutnya "bebas dan aktif" dan "kepentingan nasional." Dua peristilahan ini telah terlalu sering dikemukakan oleh berbagai kalangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas-tugas penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia tetapi sering kali tidak dijelaskan apa maknanya.

Pertama mengenai prinsip dan pengertian dari politik luar negeri yang bebas dan aktif. Prinsip yang sekarang dipergunakan sebenarnya bukan merupakan hal baru bagi sejarah hubungan luar negeri Indonesia. Pernyataan mengenai dasar atau prinsip "bebas dan aktif" ini pertama kali dikemukakan pada masa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam pidatonya di muka Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diberi judul "Mendayung Antara Dua Karang," Mohammad Hatta, yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada waktu itu, pada tanggal 2 September 1948, antara lain menyatakan:

"Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?"

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap *menjadi subyek yang berhak menentukan sikap sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri ...*"¹

Selanjutnya ia mengemukakan sebagai berikut:

"Tiap-tiap orang di antara kita tentu ada mempunyai simpati terhadap golongan ini atau golongan itu, akan tetapi perjuangan bangsa tidak bisa dipecah dengan menuruti simpati saja, tetapi hendaknya *didasarkan kepada realiteit, kepada kepentingan negara kita setiap waktu.* ...

Betapa juga lemahnya kita sebagai bangsa yang baru merdeka dibandingkan dengan dua raksasa yang bertentangan, Amerika Serikat dan Soviet Rusia, menurut anggapan pemerintah kita harus tetap mendasarkan perjuangan kita atas adagium: percaya kepada diri-sendiri dan berjuang atas tenaga dan kesanggupan yang ada pada kita."²

Keterangan yang disampaikan oleh Mohammad Hatta itu, yang juga merupakan jawaban terhadap desakan dari kalangan Front Demokrasi Rakyat (FDR) agar Indonesia secara terus terang memilih bersekutu dengan Uni Soviet

¹Mohammad Hatta, *Mendayung Antara Dua Karang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 17-18. Huruf miring oleh penulis.

²*Ibid.*, hal. 18-20. Huruf miring oleh penulis.

dalam menentang imperialisme, kemudian diterima oleh KNIP sebagai pedoman bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Apa yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta itu menyebut adanya kendala bagi politik luar negeri Indonesia, yaitu blok Amerika Serikat dan blok Uni Soviet; untuk menghadapi keadaan itu, hendaknya kita tidak sekedar menjadi obyek, tetapi harus menjadi subyek (yang berarti aktif) yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri (berarti adanya prinsip bebas). Tetapi pengertian bebas seperti itu ternyata dibatasi oleh "realitas dan kepentingan negara." Dihadapkan pada pilihan untuk bersekutu apa dengan Amerika Serikat atau dengan Uni Soviet dan sekutu mereka masing-masing, pilihannya adalah untuk "bebas" memilih jalan di luar "ini atau itu," suatu pilihan yang tidak berarti semata-mata netral. Sebagaimana PM Wilopo menjelaskan dalam bulan Mei 1952, dalam pelaksanaan politik luar negerinya menghadapi dua blok yang saling bersaing dan bermusuhan itu, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bersikap *bebas* dalam pengertian: (a) tidak secara permanen berpihak kepada salah satu pihak yang saling bertentangan satu sama lain itu; dan (b) tidak bersikap secara permanen masabodoh atau netral dalam segala hal yang mungkin timbul dari pertentangan kedua blok tersebut.¹ Tetapi orang sering menyalahartikan pengertian politik luar negeri Indonesia yang "bebas dan aktif" itu adalah identik dengan netral, menjaga jarak sama jauh, dan harus selalu dalam keadaan berimbang dalam berhubungan dengan negara-negara lain, khususnya dalam konteks persaingan negara-negara adikuasa (superpower).

Dalam masa Orde Baru, pada dasarnya politik luar negeri Indonesia tidak berbeda dengan apa yang telah digariskan oleh Hatta dan Wilopo itu. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 menegaskan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia, yang merupakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Indonesia pada masa Orde Lama. Di sana dinyatakan kembali sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif dan mengabdikan kepada kepentingan nasional. Pernyataan serupa juga diulangi dalam GBHN-GBHN yang telah dihasilkan oleh sidang-sidang MPR pada masa Orde Baru, yaitu Ketetapan-ketetapan MPR No. IV/MPR/1973; No. IV/MPR/1978; dan No. II/MPR/1983.

KEPENTINGAN NASIONAL

Kedua adalah pengertian tentang "kepentingan nasional" dalam konteks politik luar negeri Indonesia. Sebetulnya kata "kepentingan nasional" me-

¹Diambil dari Mohammad Hatta, *Portrait of a Patriot* (The Hague: Mouton Publishers, 1972), hal. 55.

rupakan istilah yang sangat umum dipergunakan oleh negara yang terlibat dalam hubungan-hubungan dengan negara lain. Penggunaan istilah itu tampaknya akan terus berlangsung selama negara-bangsa merupakan satuan kehidupan politik terpenting yang mengikat ketaatan sejumlah besar atau sekumpulan manusia di dunia ini. Dalam kondisi yang demikian itu, para negarawan, politisi, pembuat keputusan, diplomat, dan mereka yang bertindak atas nama negara akan mempergunakan dan menempatkan "kepentingan nasional"-nya di atas kepentingan-kepentingan lain, baik yang sifatnya internasional maupun yang bersifat sub-nasional.

Akan tetapi harus disadari bahwa dalam suatu masyarakat nasional terdapat berbagai kepentingan yang barangkali hanya menjadi kepentingan dari segelintir orang, dari sebagian kecil dari masyarakat, atau sebagian besar masyarakat, atau mungkin ada kepentingan-kepentingan yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat.¹ Lagi pula kepentingan-kepentingan tersebut dapat berupa hal-hal yang nyata dan konkrit, tetapi juga dapat berupa hal-hal yang sifatnya ideal non-material. Apa pun bentuk kepentingan yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh sesuatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, ia akan menentukan alokasi sumber-sumber daya yang dikerahkan untuk mencapai atau mempertahankan kepentingan-kepentingan itu sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Karena itu masalahnya adalah bagaimana menempatkan apa yang dinamakan "kepentingan nasional" itu ke dalam urutan prioritas, sebab tidak setiap kepentingan atau sasaran mempunyai bobot yang sama antara satu dengan lainnya.

Dalam diri negara dan bangsa Indonesia sudah dapat dipastikan adanya berbagai macam kepentingan dan sasaran; ada kepentingan-kepentingan yang menyangkut seluruh negara dan bangsa, seperti misalnya kelangsungan hidup negara dan bangsa, tetapi ada pula kepentingan-kepentingan yang hanya menyangkut sekelompok tertentu anggota masyarakat saja, misalnya kemudahan-kemudahan untuk bepergian ke luar negeri untuk tamasya. Ada tujuan-tujuan yang sifatnya lebih nyata dan konkrit seperti misalnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, membangun kekuatan angkatan bersenjata yang mampu melindungi nusa dan bangsa, tetapi ada pula maksud-maksud yang lebih bersifat ideal, non-material dan universal, misalnya demokratisasi hubungan antar negara, penghormatan hak-hak asasi manusia,

¹Mengenai konsep "kepentingan nasional" ini, terdapat sejumlah telaah dan pembahasan, baik yang menyangkut esensinya maupun kritik-kritik terhadap penggunaannya dalam hubungan internasional. Lihat misalnya, Hans J. Morgenthau, *Dilemmas of Politics* (Chicago: The University of Chicago Press, 1958); Robert E. Osgood, *Ideals and Self-interests in America's Foreign Relations* (Chicago: The University of Chicago Press, 1953); Joseph Frankel, *National Interest* (London: Pall Mall, 1970); dan Fred A. Sondermann, "The Concept of the National Interest," *Orbis*, (Spring, 1977), hal. 121-138.

dan perdamaian abadi di muka bumi. Dengan ini hendak dikatakan bahwa urutan prioritas diperlukan bagi Indonesia dalam mengejar tujuan-tujuan dan sasaran-sasarannya yang melampaui batas-batas kedaulatan nasionalnya.

PRIORITAS DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Telaah ini membatasi diri pada keadaan yang dihadapi oleh Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya untuk periode yang diemban oleh GBHN tahun 1983-1988. Walaupun demikian, untuk melihat prioritas yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negerinya, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu pokok-pokok kebijaksanaan yang melandasi politik Orde Baru. Tentu saja yang akan diuraikan di bawah ini adalah pokok-pokok pikiran yang diambil dari ketetapan-ketetapan MPR(S) secara garis besar sejauh yang menyangkut politik luar negeri Indonesia.

Secara eksplisit Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 merupakan salah satu dokumen yang mendefinisikan tujuan-tujuan politik luar negeri bebas-aktif. Disebutkan bahwa tujuan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah "Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan menegakkan ketiga segi tujuan Revolusi, yaitu: (1) pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan yang Demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke; (2) pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu; (3) pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerjasama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada Perdamaian Dunia yang sempurna." Jadi pada dasarnya tujuan-tujuan itu mencakup upaya-upaya untuk mempertahankan dan memelihara integritas dan kesatuan negara, mencapai kesejahteraan rakyat, dan hidup berdampingan secara damai dan bertetangga baik dengan negara-negara lain. Akan tetapi Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 ini dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 Pasal 2 ayat 1 berhubung materinya telah tertampung dalam GBHN (Ketetapan No. IV/MPR/1973).

Dinyatakan dalam GBHN 1973-1978 bahwa pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi, dan menekankan prioritas hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya untuk terselenggaranya suatu stabilitas kawasan yang akan memberikan sumbangan bagi negara-negara di

dalam wilayah itu dalam mengurus dirinya sendiri melalui pengembangan ketahanan nasional masing-masing. ASEAN menduduki tempat terpenting dalam urutan prioritas ini. Baru kemudian hubungan Indonesia dengan negara-negara dan organisasi lainnya di luar Kawasan Asia Tenggara/Pasifik Barat Daya. Sementara itu GBHN 1978-1983 menyebutkan bahwa pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif harus diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk pembangunan di segala bidang. Selebihnya titik berat dalam GBHN ini tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil dengan GBHN 1973-1978.

Selain hal-hal di atas, GBHN 1978-1983 juga menyebutkan hasrat Indonesia untuk meningkatkan peranannya di dunia internasional dalam upaya membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang bermanfaat antara bangsa-bangsa. Dalam kaitan ini, GBHN 1983-1988 juga mengamanatkan perlunya bagi Indonesia untuk turut serta berperanan aktif di arena internasional untuk melaksanakan ketertiban dunia dengan mengingat kemampuan yang ada. Walaupun hasrat itu ada, titik berat GBHN 1983-1988 tetap tidak mengalami perubahan. Dalam bidang hubungan luar negeri dinyatakan bahwa:

- a. Pelaksanaan politik luar negeri yang *bebas dan aktif dilaksanakan secara konsekuen dan diabdikan untuk kepentingan nasional*, terutama untuk *kepentingan pembangunan di segala bidang*.
- b. Usaha dan peranan Indonesia dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, *melalui forum-forum dan kerjasama internasional, regional dan bilateral* perlu terus ditingkatkan *sesuai dengan kemampuan nasional*.
- c. Dalam rangka itu perlu dilanjutkan dan ditingkatkan usaha-usaha serta peranan Indonesia dalam ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan dunia yang mengancam perdamaian dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.
- d. Kerjasama di antara negara-negara di Kawasan *Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya* perlu makin ditingkatkan. Khususnya kerjasama di antara negara-negara anggota *ASEAN* akan terus dikembangkan dan diperluas dalam rangka memperkuat *ketahanan nasional* masing-masing negara anggotanya serta memperkuat *ketahanan regional*, menuju terwujudnya *Kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral dan sejahtera*.
- e. Dalam rangka kerjasama ASEAN perlu makin ditingkatkan kerjasama-kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, baik antar pemerintah maupun antar masyarakat.

- f. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa perlu diperluas dan ditingkatkan. Demikian pula perlu ditingkatkan perjuangan Indonesia di dunia internasional mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional, seperti upaya memantapkan pelaksanaanawasan Nusantara, upaya memperluas *pasar ekspor Indonesia*, dan sebagainya.
- g. Dalam rangka perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial perlu ditingkatkan usaha-usaha penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesatuan sikap, serta kerjasama di antara *negara-negara yang sedang berkembang*, dengan memanfaatkan forum-forum seperti *Organisasi Negara-negara Non-Blok*, *Organisasi Konferensi Islam*, *Perserikatan Bangsa-Bangsa* dan lain-lain.
- h. Khususnya dalam rangka mewujudkan *Tata Ekonomi Dunia Baru* perlu dilanjutkan langkah-langkah, bersama-sama negara berkembang lainnya, untuk mempercepat terwujudnya *perjanjian internasional mengenai komoditi*, melenyapkan hambatan serta pembatasan yang dilakukan oleh negara-negara industri terhadap ekspor negara-negara berkembang, serta meningkatkan *kerjasama ekonomi dan teknik antar negara berkembang*, di samping usaha-usaha lainnya.
- i. Setiap perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia, baik politik maupun ekonomi, harus diikuti secara saksama agar dapat diketahui pada waktunya kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengamankannya. Dalam pada itu perkembangan dunia yang mengandung kesempatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.¹

Pokok-pokok yang tercantum dalam GBHN itu merupakan arah yang seharusnya ditempuh oleh Indonesia. Oleh karena landasan tersebut secara jelas menunjukkan adanya kaitan antara masalah-masalah di dalam negeri dan sasaran-sasaran di luar batas-batas yurisdiksi nasional, maka sudah barang tentu tidak semua hal akan dilaksanakan dalam kadar yang sama tanpa memperhatikan kemampuan yang tersedia untuk mencapainya. Ia pada dasarnya menunjukkan bahwa pedoman dasar politik luar negeri yang bebas dan aktif dan mengabdikan kepada kepentingan nasional dijiwai oleh dinamika sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan tersedianya kemampuan untuk itu. Karena adanya dinamika itu pula maka ia sebenarnya ingin menjawab tantangan-

¹Huruf miring oleh penulis.

tantangan yang selalu berubah dalam hubungan antar bangsa. Inilah sesungguhnya arti yang diberikan oleh GBHN bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia: berbuat sesuai dengan realitas baik di dalam negeri maupun di luar yurisdiksi nasional untuk memperoleh manfaat maksimal bagi bangsa dan negara secara keseluruhan dan sedapat mungkin juga bagi kepentingan-kepentingan bangsa lain.

REALITAS-REALITAS YANG DIHADAPI

Dalam kwartal pertama tahun 1983 Menlu Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa meningkatkan citra Indonesia di kalangan Dunia Ketiga berdasarkan politik luar negeri yang bebas dan aktif merupakan titik berat politik luar negeri Indonesia dalam lima tahun mendatang.¹ Di lain pihak, Presiden Soeharto pada amanatnya ketika melantik Duta-duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Bangladesh, Iran, dan beberapa negara di Amerika Selatan, tanggal 13 April 1983 antara lain menyatakan bahwa: "... kita juga sadar bahwa melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif itu tidaklah gampang, lebih-lebih dalam situasi dunia seperti sekarang ini."² Dua pernyataan ini pada dasarnya adalah persoalan yang kini dihadapi oleh politik luar negeri Indonesia dalam kabinet sekarang.

Tidak dapat disembunyikan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia lebih dari 15 tahun terakhir dititikberatkan pada usaha-usaha yang menopang pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat terjadi semata-mata dengan mengandalkan pada kemampuan dalam negeri saja. Oleh karena itu ditegaskan dalam Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 bahwa dalam politik luar negerinya Indonesia pada dasarnya tidak melakukan politik isolasi dan tidak pula melakukan politik netralitas. Bahwa keputusan pemerintah kemudian adalah untuk melakukan pembangunan dengan titik berat pada aspek ekonomi, konsekuensinya dalam pelaksanaan politik luar negeri adalah menempuh suatu kebijaksanaan yang mendukung maksud-maksud itu. Dan oleh karena untuk membangun tersebut tuntutan akan barang-barang modal menjadi syarat yang tidak dapat dihindarkan, dan barang modal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh sumber-sumber di dalam negeri, maka politik mencari sumber modal di luar negeri adalah satu alternatif yang tersedia, dan ditempuh oleh pemerintah, untuk memenuhi maksud-maksud tersebut.

¹Mengenai pernyataan itu, antara lain lihat dalam "Politik Luar Negeri RI Tidak Lagi 'Low Profile'," *Kompas*, 22 Maret 1983.

²"Amanat Presiden Soeharto pada Pelantikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa-Penuh Republik Indonesia pada Tanggal 13 April 1983 di Istana Negara," *Pewarta Departemen Luar Negeri* (April-Juni 1983), hal. 13.

Pada masa lalu tampak sekali orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang demikian itu, seperti kelihatan dalam hubungan Indonesia yang erat dengan negara-negara pemilik modal -- yang pada umumnya adalah negara-negara Barat. Oleh para kritikus kebijaksanaan demikian itu dipandang sebagai perubahan alur politik luar negeri Indonesia ke arah Blok Barat dan dianggap menjadikan Indonesia tergantung -- sampai pada tingkat tertentu -- kepada pemberi bantuan atau para penanam modal. Tetapi dari sisi lain ditempuhnya kebijaksanaan demikian itu adalah atas pilihan Indonesia sendiri untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang terkandung dalam pilihan kebijaksanaan tersebut.¹

Sendi kedua yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dewasa ini adalah penempatan prioritas politik Kawasan Asia Tenggara dalam urutan teratas. Pendekatan regional Indonesia dalam masa Orde Baru sebenarnya bukanlah suatu hal yang sama sekali baru bagi pelaksanaan-pelaksanaan politik luar negeri. Yang baru adalah tekanan perhatian pada stabilitas dan keamanan kawasan sebagai kondisi yang menopang pembangunan ekonomi di dalam negeri. Suatu kawasan yang penuh konflik atau ketegangan, baik karena persengketaan di dalam negeri sendiri, antar negara ataupun campur tangan kekuatan luar atas negara-negara di kawasan, dianggap merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima oleh Indonesia oleh karena akan mengganggu kepentingan nasionalnya. Dengan perkataan lain, tekanan politik luar negeri Indonesia pada kawasan pada dasarnya adalah politik keamanan, dan aspek ekonomi politik kawasan ini pada awalnya tidak menonjol. Karena pilihan demikian itu maka masalahnya bukan menjadi apakah pilihan itu memang sudah tepat, tetapi masalah bagaimana menjadikan Kawasan Asia Tenggara seperti yang diproyeksikan. Tahap permulaan yang dilakukan ialah menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan bersama-sama dengan negara-negara lain di kawasan membentuk ASEAN.

Baik di kalangan dalam negeri sendiri maupun di kalangan masyarakat internasional, ASEAN dianggap telah mencapai sukses-sukses. Sukses ASEAN terutama dinilai oleh kemampuannya menciptakan iklim politik dan keamanan yang mendorong bagi dilakukannya kerjasama tingkat regional di berbagai bidang.² Di bidang politik misalnya konsultasi-konsultasi antar pemerintah baik mengenai masalah di dalam ASEAN sendiri maupun dalam

¹Untuk diskusi yang mendalam mengenai dilema hubungan luar negeri antara kebutuhan mendapat bantuan luar negeri dan masalah ketergantungan, antara lain dapat diikuti dalam Franklin B. Weinstein, *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence from Soekarno to Soeharto* (Ithaca: Cornell University Press, 1976).

²Thesis mengenai aspek politik dan keamanan ASEAN ini dikemukakan oleh, antara lain, J. Soedjati Djiwandono dalam "The Political and Security Aspects of ASEAN: Its Principal Achievements," *The Indonesian Quarterly*, Vol. XI, No. 3 (Juli 1983), hal. 19-26.

menghadapi masalah-masalah internasional sangat menonjol. Di bidang keamanan, negara-negara ASEAN telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada atau yang timbul melalui cara-cara damai. Di bidang ekonomi ASEAN lebih berhasil dalam mengkoordinasikan kebijakannya menghadapi kekuatan-kekuatan ekonomi di luar kawasan, sedangkan di dalam ASEAN sendiri kesepakatan-kesepakatan dalam bidang kerjasama ekonomi regional banyak ditelurkan. Tetapi Kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan masih belum sepenuhnya merupakan kawasan yang benar-benar aman dan stabil. Kawasan ini masih diganggu oleh berbagai ketegangan, sengketa, dan konflik. Karena itu, apabila politik regional Indonesia di Asia Tenggara tidak semata-mata politik di ASEAN, maka Asia Tenggara secara keseluruhan juga menuntut perhatian demi terselenggaranya stabilitas dan keamanan kawasan.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan sebagai sumber sengketa dan ketegangan di antara negara-negara Asia Tenggara. Pertama, adalah masalah pembangunan bangsa (*national building*) dari masing-masing negara, yang menyangkut masalah-masalah ideologi, pembagian kekuasaan dan pelaksanaannya, perselisihan domestik, masalah mayoritas-minoritas, separatisme, dan strategi pembangunan nasional. Masalah-masalah ini tidak saja menimbulkan konflik di dalam negeri tetapi juga mempunyai pengaruh dalam hubungan bertetangga di Asia Tenggara. Masalah kedua adalah antagonisme historis di kalangan negara-negara Asia Tenggara yang meliputi masalah-masalah persaingan politik, permusuhan historis, dan perbedaan identitas dan budaya yang mendalam antara negara satu dan lainnya. Masalah ketiga yang dapat menimbulkan sengketa dan konflik antar negara di Kawasan Asia Tenggara adalah belum tegasnya demarkasi perbatasan di antara berbagai negara setelah selesainya masalah kolonial di kawasan ini. Masalah-masalah tersebut terutama terjadi di Kawasan Asia Tenggara daratan. Di wilayah Laut Cina Selatan sengketa teritorial juga makin menonjol karena kemungkinan potensi yang terkandung di dalamnya. Dari tiga hal tersebut, antagonisme historis dan demarkasi perbatasan merupakan sumber-sumber ketidakstabilan yang utama.

MASALAH-MASALAH AKTUAL

Salah satu rintangan utama bagi stabilitas dan keamanan Asia Tenggara adalah masalah Kampuchea. Banyak sudah seminar diselenggarakan dan makalah ditulis mengenai masalah ini; sedangkan PBB dan negara-negara ASEAN telah menentukan sikapnya atau menawarkan cara-cara penyelesaian masalah Kampuchea. Tetapi selama ini pula Vietnam tetap pada posisinya di Kampuchea. Tampaknya, suatu penyelesaian masalah ini harus mempertim-

bangkan kepentingan-kepentingan politik dan keamanan Vietnam di wilayah tersebut karena masuknya Vietnam ke Kampuchea bukan tanpa alasan-alasan yang absah. Jika pemecahan yang ditawarkan oleh PBB dan ASEAN tidak banyak membawa hasil, maka itu tidak berarti bahwa Indonesia juga harus berhenti sampai di tingkat ASEAN saja dalam mengupayakan pemecahan. Pintu bilateral yang tersedia, yaitu melalui hubungan Indonesia-Vietnam, dapat dimanfaatkan untuk maksud-maksud tersebut guna membantu mengatasi kemacetan yang kini terjadi. Apabila masalah Kampuchea dibiarkan berlarut-larut, stabilitas regional dapat terganggu bila masalah itu makin menarik kekuatan-kekuatan luar kawasan terlibat semakin dalam pada masalah-masalah politik dan keamanan di kawasan ini.

Kawasan berikutnya yang menjadi prioritas adalah wilayah Pasifik.¹ Kawasan ini barangkali merupakan kawasan yang kompleks sekaligus penuh harapan. Di Pasifik terwakili hampir semua aspek kehidupan dalam hubungan internasional. Ada negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang, komunis—non-komunis, Barat—Timur—Non-Blok, kapitalis-sosialis, dan negara kelompok Utara lawan kelompok Selatan. Bersamaan dengan itu, Kawasan Pasifik dipandang merupakan wilayah yang mengalami perkembangan paling dinamis dalam dasawarsa terakhir. Lagi pula, dua partner dagang Indonesia terbesar terdapat di kawasan ini, yaitu Jepang dan Amerika Serikat. Dan kini desakan-desakan untuk membentuk suatu wadah kerjasama ekonomi di Kawasan Pasifik sedang dilancarkan secara aktif.²

Ada empat kekuatan besar yang secara aktif terlibat dalam percaturan politik, keamanan, dan ekonomi di kawasan ini, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, RRC, dan Jepang. Semula ada anggapan bahwa di Kawasan Pasifik itu akan berkembang suatu hubungan segitiga Amerika Serikat-RRC-Jepang untuk menghadapi apa yang disangka sebagai ekspansionisme dan peningkatan hegemoni Uni Soviet. Ternyata perkembangan menunjukkan bahwa hubungan Amerika Serikat-RRC mempunyai keterbatasan-keterbatasan dan rintangan, seperti sikap Amerika Serikat mengenai Taiwan dan hubungannya dengan negara-negara ASEAN, sehingga tidak dapat berkembang menjadi suatu aliansi Amerika-Cina. Cina sendiri yang sedang berjuang untuk empat

¹Yang disebutkan dalam GBHN adalah Kawasan Pasifik Barat Daya. Dengan tidak mengabaikan pentingnya negara-negara di Kawasan Pasifik Barat Daya, seperti Australia, Papua Nugini, New Zealand, dan sebagainya, uraian ini justru lebih menitikberatkan pada Kawasan Pasifik secara keseluruhan.

²Mengenai usaha-usaha ke arah kerjasama ekonomi di Kawasan Pasifik dan persoalan-persoalan yang dihadapi, lihat misalnya Hadi Soesastro dan Han Sung-joo (eds.), *Pacific Economic Cooperation: The Next Phase* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1983).

modernisasinya (ekonomi, industri, pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi) masih tetap menunjukkan ketidakpastian arah di masa depan seperti halnya banyak negara sedang berkembang lainnya.

Namun perlu diperhatikan bahwa persaingan dan perselisihan Cina-Soviet dan adanya pendekatan-pendekatan segitiga Amerika Serikat-RRC-Jepang, telah mengakibatkan meningkatnya penempatan kekuatan militer Uni Soviet di Kawasan Pasifik dan Timur Jauh. Dari segi ini, satu hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kemampuan dan kehadiran Angkatan Laut Soviet di Kawasan Asia-Pasifik, khususnya dalam kaitan dengan pemanfaatan fasilitas pangkalan Cam Ranh Bay dan Da Nang di Vietnam. Meskipun mungkin ada usaha-usaha ke arah pendekatan antara Cina dan Uni Soviet, tampaknya Uni Soviet akan tetap memelihara dan meningkatkan kehadiran dan fasilitas-fasilitas militernya di Kawasan Pasifik. Sebabnya adalah karena Uni Soviet, sebagaimana kekuatan-kekuatan besar di Asia-Pasifik lainnya, berhasrat untuk menjadi suatu kekuatan tangguh di kawasan ini. Di samping itu, Uni Soviet juga mempunyai komitmen-komitmen politik dan militer di kawasan ini yang harus dipeliharanya, sama seperti negara besar lainnya. Karena itu tidaklah berlebihan bahwa Kawasan Pasifik dipandang mempunyai kaitan yang cukup kuat dengan kepentingan nasional dari negara-negara yang merasa dirinya bagian dari kawasan ini. Indonesia adalah salah satu dari negara-negara di Pasifik itu.

Karena pertimbangan-pertimbangan politik-strategis dan ekonomis tersebut, ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara-negara di wilayah Pasifik dan pada keamanan dan stabilitas wilayah menjadi nyata. Mengingat adanya semacam saling ketergantungan Indonesia dan negara-negara di Kawasan Pasifik, maka tidaklah bijaksana kalau perkembangan-perkembangan baik dalam bidang politik, keamanan maupun ekonomi tidak diperhatikan secara saksama atau ditanggapi secara *a priori*. Mengisolasi diri dari arus perkembangan di kawasan itu bagi perkembangan di dalam negeri sendiri tampaknya bukan suatu jawaban terbaik karena kepentingan-kepentingan politik, keamanan dan ekonomi Indonesia sebagian terkait dengan kawasan itu. Karena masalahnya menyangkut banyak pihak, akomodasi-akomodasi terhadap kenyataan-kenyataan yang ada diperlukan. Masalahnya adalah apa bentuk keterlibatan Indonesia di kawasan yang dipandang paling dinamis di dunia itu. Bagaimana menjawab perkembangan politik dan militer di kawasan, khususnya sejauh RRC dan Uni Soviet terlibat? Politik apa yang diperlukan untuk menghadapi negara-negara industri maju dan yang sedang berkembang menjadi negara industri di kawasan ini demi manfaat pembangunan nasional, khususnya apabila dikaitkan dengan neraca ekspor-impor Indonesia?

Hasrat untuk meningkatkan citra Indonesia di mata internasional pada dasarnya melibatkan suatu kebijakan yang kompleks mengenai berbagai ma-

salah penting tidak hanya di Kawasan Asia-Tenggara tetapi juga di kawasan-kawasan lain di dunia. Kebijakan itu laksana pisau bermata dua: di satu sisi ia harus menentukan sikap politik mengenai berbagai persoalan dasar yang dihadapi oleh berbagai kawasan dunia, dan karena itu membawa konsekuensi-konsekuensi bagi hubungan bilateral; di sisi lain ia harus mendukung strategi ekonomi (khususnya yang berkaitan dengan sasaran-sasaran ekspor) yang mempunyai dampak paling langsung pada kebijakan-kebijakan ekonomi. Hubungan-hubungan bilateral karena itu akan tetap penting untuk tujuan-tujuan tersebut. Memelihara dan meningkatkan yang telah ada, misalnya dengan negara-negara yang selama ini menjadi partner dan sahabat baik dalam pengertian politik maupun ekonomi, adalah salah satu tugasnya. Tindakan lainnya adalah mengembangkan kebijakan-kebijakan itu pada negara-negara lainnya yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, seperti di antara negara-negara Dunia Ketiga dan negara-negara sosialis.

Apabila ofensi kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan terhadap semua, masalahnya adalah menentukan prioritas kawasan atau negara mana saja yang dipandang mempunyai potensi untuk maksud-maksud tersebut dan dapat dijangkau sesuai dengan kemampuan yang tersedia. Hal ini penting terutama sejauh hubungan bilateral Indonesia bersangkut-paut dengan kebijakan-kebijakan di berbagai forum dan organisasi internasional, seperti Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam dan PBB. Upaya-upaya untuk menggalang dan memupuk kesatuan sikap dan kerjasama di antara negara-negara Dunia Ketiga tidak harus dipertentangkan dengan upaya untuk memperluas pasaran ekspor ke negara-negara sedang berkembang. Atau juga perjuangan untuk turut aktif mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru bukan berarti mengakibatkan kendala-kendala terhadap strategi pengembangan pasaran ekspor. Untuk itu tentu dibutuhkan ketegasan kebijakan dan kecekatan bertindak baik oleh pelaksana-pelaksana yang bertanggung jawab dalam bidang politik maupun ekonomi. Konsekuensinya, koordinasi di dalam negeri sendiri merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari.

Sebagai gambaran dari persoalan itu adalah sikap Indonesia yang berpandangan bahwa Gerakan Non-Blok dan Organisasi Konferensi Islam merupakan forum-forum penting yang harus dipertimbangkan dalam percaturan internasional, baik sebagai media untuk mencari dan memelihara perdamaian internasional maupun sebagai wahana dalam mengembangkan hubungan-hubungan yang konstruktif di kalangan negara-negara Dunia Ketiga.¹ Meskipun forum-forum ini penting, tidak dapat diingkari bahwa forum-forum ini kini menghadapi tantangan-tantangan yang nyata dan mendasar menyangkut

¹Tentang forum-forum ini, lihat misalnya Mochtar Kusumaatmadja, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, diedit oleh Eddy Damian dan Budiono Kusumohamidjojo (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), khususnya Bagian II, Bab 2 dan 4.

identitas mereka sendiri, masalah persatuan di antara para anggotanya, dan efektivitas tindakannya.¹ Meskipun terdapat semboyan-semboyan yang bernada solidaritas dan persatuan di kalangan anggota-anggota mereka, perpecahan di dalam tubuh masing-masing forum tidak dapat disembunyikan, baik perpecahan karena pengaruh negara-negara adikuasa (superpower) yang telah merasuki mereka, karena adanya negara-negara anggota yang berhaluan radikal dan konservatif, maupun karena sengketa-sengketa dan konflik-konflik di antara anggotanya masing-masing. Menyadari bahwa forum-forum internasional seperti itu menghadapi dilema, ketegasan sikap Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan di antara negara-negara Dunia Ketiga sendiri senantiasa perlu dijaga sehingga masalah yang telah kompleks dalam kaitan ini tidak menjadi alasan bagi pengambilan keputusan untuk ragu-ragu bertindak dalam politik (dan ekonomi) luar negeri Indonesia. Bagaimana, misalnya, sikap Indonesia terhadap konflik Iran-Irak, posisi Mesir dalam konflik Arab-Israel, dan konsekuensi-konsekuensi apa yang timbul bagi upaya-upaya untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara tersebut?

Singkat kata, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dewasa ini terjadi dalam suatu jaman yang menuntut upaya-upaya penyesuaian-penyesuaian kepada tata cara yang berkembang dalam hubungan internasional dan berkaitan tidak saja dengan hubungan-hubungan bilateral tetapi juga hubungan-hubungan multilateral melalui berbagai forum dan lembaga internasional menyangkut berbagai masalah seperti hidup berdampingan secara damai, pengaturan penggunaan ruang angkasa, wilayah laut, eksploitasi sumber-sumber alam dan kekayaan lainnya, perdagangan internasional, proteksionisme, kependudukan, informasi, hak-hak asasi manusia, perlucutan senjata, dan masalah-masalah lain yang tidak dapat disebut satu per satu di sini. Artinya, kalau citra Indonesia tidak ditingkatkan di arena internasional, lembaga-lembaga yang mempunyai sangkut-paut dengan persoalan-persoalan internasional tersebut harus menunjukkan bahwa Indonesia ada di antara mereka. Pengalaman dalam memperjuangkan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara barangkali merupakan salah satu contoh dari kecakapan dan keuletan itu.

PENUTUP

Secara umum ada dua hal yang menjadi pokok pikiran dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. *Pertama*, adalah keinginan untuk melaksanakan suatu politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan salah satu misinya untuk

¹Bandingkan misalnya dengan Fabio Tana, "Hard Times for Third World Bodies," dalam *Politica Internazionale* (Spring, 1983), hal. 83-92.

meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Pokok pikiran ini secara tradisional menjadi pegangan para pelaksana dan pembuat keputusan terutama sejauh politik pemerintah yang sekarang tersangkut. *Kedua*, adalah kenyataan bahwa amanat untuk mengabdikan kepada kepentingan nasional dalam prakteknya menghadapi keterbatasan-keterbatasan. Usaha-usaha pembangunan di segala bidang, dengan catatan bahwa pembangunan ekonomi masih merupakan salah satu tema sentral, masih menghadapi keterbatasan-keterbatasan untuk mengandalkan diri pada sumber daya yang tersedia di dalam negeri. Kebutuhan-kebutuhan akan dana, barang-barang modal, teknologi, dan bahkan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengelolanya tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari sumber-sumber di dalam yang tersedia. Dari sisi kepentingan ekonomi pula kini kebutuhan akan pasaran yang lebih luas dan lebih besar bagi barang-barang produksi Indonesia, baik bahan-bahan mentah maupun barang-barang industri, dirasakan semakin mendesak untuk memelihara tingkat pertumbuhan yang telah ditetapkan. Di pihak lain, situasi dan perkembangan di lingkungan luar negeri tidak selalu menyenangkan untuk maksud-maksud tersebut.

Menghadapi kerumitan-kerumitan itu, tugas politik luar negeri Indonesia adalah menyeimbangkan hal-hal yang dinilai pokok secara serentak dengan berbagai realitas internasional. Hubungan-hubungan yang sifatnya bilateral, terutama dengan partner tradisional, masih tetap menjadi bagian yang mendasar. Karena adanya keterbatasan untuk meningkatkan hubungan, misalnya perdagangan dan investasi, dari partner-partner yang dianggap tradisional, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa Barat, membuka hubungan-hubungan bilateral baru dengan negara-negara yang mempunyai potensi di berbagai kawasan dunia merupakan tuntutan yang makin mendesak. Ini berarti bahwa pertaruhan Indonesia di luar negeri menjadi semakin besar, baik dalam pengertian politik maupun ekonomi. Pada gilirannya, inisiatif-inisiatif yang datang dari Indonesia untuk tanggap pada lingkungan luarnya juga makin diperlukan. Alasannya adalah karena sebagian dari kepentingan nasional Indonesia berada di luar yurisdiksi nasionalnya.

Apabila beban-beban dari lingkungan luar menjadi lebih besar dan karena itu menghendaki *keaktifan* pelaksanaan politik luar negeri, melakukan semacam aliansi baik secara formal maupun tidak akan berakibat keterbatasan-keterbatasan alternatif untuk memenuhi misi yang dipikul. Sampai tingkat tertentu Indonesia, menurut pertimbangan-pertimbangannya, telah berhasil memelihara diri untuk tidak melalaikan sifat bebas dari politik luar negerinya. Yang diperlukan kini antara lain adalah meningkatkan hubungan dengan kekuatan dan potensi lainnya agar fleksibilitasnya terpelihara dan semakin besar. Hubungan dengan negara-negara yang disebut sebagai "new industrializing countries" di berbagai kawasan dunia, dengan negara-negara so-

sialis, dan dengan negara-negara regional yang potensial secara lebih intensif dapat membantu fleksibilitas dalam memilih alternatif pada saat partner tradisional menunjukkan batas maksimum yang dapat dijangkau. Hubungan bilateral ini akan menjadi semakin kuat apabila "kewajiban-kewajiban" yang sifatnya multilateral juga dapat dipenuhi, baik dalam hubungan dengan organisasi-organisasi internasional maupun forum-forum multilateral.

Mengingat sasaran-sasaran yang akan dicapai dan beban-beban yang berat, masalah sebagian juga kembali ke dalam lagi. Koordinasi kerja di antara pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan hubungan dan kebijakan luar negeri menjadi suatu keharusan, terutama untuk menghindari kemacetan-kemacetan yang mungkin diakibatkan oleh birokrasi. Koordinasi itu menyangkut kerja di dalam lembaga atau departemen masing-masing dan koordinasi antar departemen. Artinya, perlu adanya kemampuan nyata dari lembaga-lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam masalah-masalah hubungan luar negeri dan masalah-masalah internasional seperti hukum laut, pembangunan internasional, pangan, kesehatan, perluasan senjata, proteksionisme, pemanfaatan ruang angkasa, dan sebagainya. Untuk itu semua, dibutuhkan tidak hanya birokrat-birokrat yang cakap secara administratif tetapi juga tenaga-tenaga ahli yang menguasai bidang-bidang khusus dalam hubungan internasional.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.



ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp 750,— langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp 6.750,—



THE INDOONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp 1.000,—, langganan setahun (4 nomor) Rp 4.000,—, untuk Mahasiswa Rp 3.200,—



DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/buletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada: **BIRO PUBLIKASI — CSIS**
CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta 10160, Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan **PERPUSTAKAAN** dan **CLIPPINGS** yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35

